Peran Masyarakat Minang di Pentas Politik Nasional Dulu, Sekarang dan Yang Akan Datang[1]

Mochtar Naim[2]

Abstract:

This article tries to explain how Minangkabau society get involve in national political system. Ethnic society in Indonesia is separate in two type of culture, which is M and J. M for Melayu and J for Java. From the explanation about M and J the writer elaborate how this the position of Minangkabau society in Indonesia Politics after reformation era in 1998 begin.

Dari sekian banyak kelompok etnik di Indonesia ini ada sejumlah yang relatif menonjol dalam pentas politik nasional, sejak dari dulu sampai sekarang. Kelompok yang menonjol ini biasanya memiliki filosofi budaya yang mendorong mereka untuk berperan aktif dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep kekuasaan yang manifestasinya harus disalurkan melalui jalur politik. Mereka ini -- melalui pendekatan konflik yang bersifat dialektik, dikotomik dan polaristik -- dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar: satu yang berorientasi sentripetal, dan satu lagi yang berorientasi sentrifugal.

Kelompok yang berorientasi sentripetal umumnya juga bersifat hirarkis-vertikal; karenanya cenderung berorientasi feodalistik, paternalis-tik dan etatik. Dalam orientasi keagamaan dan kebudayaan kelompok ini juga cenderung berorientasi sinkretik.

Kelompok yang berorientasi sentrifugal, sebaliknya, bersifat kolateral-horizontal; karenanya cenderung berorientasi demokratik dan egaliter. Lalu dari segi orientasi keagamaan dan kebudayaan kelompok kedua ini juga cenderung berorientasi sintetik.

Dari pengkategorian secara dialektik-dikotomik dan polaristik ini segera bisa dilihat kemana masuknya berbagai kelompok etnik yang relatif menonjol dalam pentas politik nasional itu, dari dulu sampai sekarang. Dari sana lalu terlihatlah dua kutub budaya yang saling berhadapan yang saya identifikasikan sebagai kutub budaya J dan M itu. Di tengah di antara kedua kutub budaya ini terdapatlah spektrum dari kelompok

[1] Makalah ini pernah disampaikan pada Seminar Peran Masyarakat Minang Di Pentas Politik Nasional, Dulu, Sekarang Dan Yang Akan Datang, Fakultas Dakwah, IAIN Imam Bonjol Padang, Senin, 26 Juni 2004

[2] Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat periode 2004-2009

masyarakat etnik lain-lainnya yang anak panah dari kecenderungan orientasi budayanya tergantung kepada ideologi dan filosofi budaya yang mereka anut.

Secara garis besar bisa kita katakan bahwa orientasi budaya dari kelompok masyarakat Melayu yang luas tersebar di berbagai pulau di Nusantara ini umumnya anak panahnya mengarah ke kutub M, sementara kelompok masyarakat etnik yang berorientasi sentripetal, anak panah budayanya menjurus ke kutub J. Orang Melayu, seperti orang Minang yang adalah juga Melayu, cenderung berfikir sintetis, dalam arti, unsur-unsur yang membentuk kebudayaan Melayu itu bersintesis dengan sesamanya, sehingga dalam sintesis itu tidak lagi bisa dilihat yang mana unsur masing-masingnya itu. Dalam arti lain, antara unsur adat dan agama telah berpadu menjadi satu sehingga orang Melayu adalah orang Islam; dan sebaliknya, dia bukan lagi Melayu kalau bukan Islam.

Lain halnya dengan suku bangsa Jawa dan lain-lainnya yang sealiran dengan itu, yang orientasi budayanya bersifat sinkretik; dalam arti, apapun agama yang mereka anut, mereka tetap adalah orang Jawa, dst. Mereka mengakomodasi berbagai unsur budaya yang masuk yang lalu mereka jawakan secara sinkretik itu. Bagi mereka terpakai ungkapan: *sedaya agami sami kemawon*. Semua agama sama saja; sama benarnya dan sama baiknya. Dan dalam adat mereka mengenal sistem hirarki yang bersifat feodalistik dan paternalistik, di samping juga etatik. Yang mempersatukan mereka terutama adalah adatnya, bukan agamanya.

Betapapun kompleksnya masalah orientasi budaya ini dalam keadaan realita sesungguhnya, namun upaya penyederhanaan secara epistemologik melalui pendekatan konflik secara dialektik-dikotomik-polaristik ini diperlukan untuk melihat benang merah dari paradigma yang berlaku pada masing-masingnya. Cara berfikir dialektik-dikotomik-polaristik ini sesungguhnya adalah universal sifatnya, di mana orang cenderung melihat apa-apa dalam perbandingan-perbandingan dan dalam kontras antara satu sama lain. Orang misalnya mengkategorikan masyarakat dunia ini ke dalam dua kutub budaya atau kubu kelompok yang secara dialektik-dikotomik-polaristik berlawanan; katakanlah: kelompok kiri dan kelompok kanan, kelompok utara dan kelompok selatan, kelompok sosialis-komunis di satu pihak dengan kelompok kapitalis-liberal di pihak yang lain; ataupun kelompok liberal-kapitalis berhadapan dengan kelompok muslim sedunia seperti sekarang ini; dst.

Pentas budaya politik yang berskala nasional di Indonesia ini, yakni di mana berbagai kelompok etnik saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lainnya, sejarah mencatat, praktis secara lebih terorganisasi baru bermula dengan Kongres Pemuda tahun 1928, walau organisasi-organisasi nasionalis berorientasi kesukuan telah juga mulai tumbuh sejak awal abad ke 20. Dan kesadaran nasional ini dipicu tumbuhnya antara lain dengan dibukanya sekolah-sekolah oleh Belanda dengan masuknya paham *ethische politiek* dari negeri Belanda ke tanah jajahannya, Hindia Belanda, sejak dari awal abad ke 20 itu. Tetapi juga dengan bangkitnya kesadaran Asia yang dipicu oleh menangnya Jepang atas Rusia dalam perebutan wilayah dan hegemoni mereka di Timur Jauh. Sementara dunia Islampun juga mulai bangkit yang dipelopori oleh para pembaharu: Sayyid Jamaluddin al Afghani, Muhammad Abduh, dsb. dengan menyuarakan pembaharuan (reformasi) dan pemurnian dari ajaran Islam, yang di Indonesia muncul dalam gerakan Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persis, Thawalib, Permi, dsb.

Sebelum itu yang ada adalah kelompok kerajaan-kerajaan tradisional dengan orientasi primordial kesukuan masing-masing yang kedaulatan dan kekuasaannya makin terbatas dan makin mengecil dengan makin berkapitulasinya mereka kepada kekuasaan kolonial yang jauh lebih kuat yang menguasai seluruh wilayah Nusantara sejak abad ke 17 dst.

Melalui pencerahan di bidang pendidikan dan politik inilah masuknya kesadaran nasional yang awalnya adalah sebuah pengakuan bersama akan bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, lalu berlanjut dengan di ujungnya setelah Perang Dunia ke Dua sebuah perjuangan kemerdekaan melalui revolusi berdarah, dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia itu oleh dwi-tunggal Sukarno-Hatta tgl 17 Agustus 1945.

Watak dialektik-dikotomik-polaristik dari budaya politik di Indonesia itu segera terlihat ketika tokoh-tokoh politik yang rata-rata berusia muda yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah Belanda itu lalu berinteraksi, dan berdialog dalam berbagai forum organisasi sosial-politik yang mereka bentuk. Bukanlah sebuah kebetulan jika terlihat kecenderungan kuat, semua yang berasal dari kutub budaya J cenderung menganut cara berfikir yang bersifat sentripetal, feodalistik, sinkretik dst itu, sementara semua yang berasal dari kutub budaya M, pada gilirannya, juga cenderung berfikir pada jalur sentrifugal, demokratik, sintetik, dst itu. Dan ini berlanjut sampai ke gerbang kemerdekaan, dan ke sepanjang masa kemerdekaan, bahkan sampai hari ini. Ini

menunjukkan bahwa para pelaku politik yang terlihat pada pentas politik nasional itu masing-masingnya kuat dipengaruhi dan dikendalikan oleh budaya politik primordial mereka masing-masing, walau pengaruh budaya politik global dan nasional juga masuk berosmosis ke dalam diri mereka. Pembentukan budaya politik nasional itu sendiri sarat dibumbui dan dipengaruhi oleh budaya politik primordial yang dominan di samping budaya politik global yang juga ikut mewarnai.

Sejauh ini budaya politik nasional yang terlepas dari pengaruh budaya primordial itu belum berkembang seperti diharapkan. Dari segi tinjauan sosial-budaya, orang Indonesia dan elit politiknya lebih merasakan dan mengidentifikasikan diri ke dalam sebagai orang dari kelompok etnik tertentu pertama-tama, lalu kemudian baru sebagai orang Indonesia. Jurus pengidentifikasian ke masa depan diharapkan akan berproses sebaliknya, yakni sebagai orang Indonesia pertama-tama, lalu baru sebagai orang dari latar belakang etnik tertentu, kedua. Yang menjadi masalah adalah bahwa kita relatif masih terpecah-pecah ke dalam berbagai kelompok kepentingan melalui jalur etnik ini ketimbang jalur nasional yang lebih terintegrasi secara nasional.

•

Dengan latar belakang skenario budaya politik Nusantara inilah kita sekarang memfokuskan perhatian kita kepada peran masyarakat Minang di pentas politik nasional, dulu, sekarang dan yang akan datang, khususnya seperti yang dimainkan oleh elit politik mereka. Karena masyarakat Minang dalam kategori dialektik-dikotomik-polaristik budaya itu tergolong ke dalam yang berorientasi sentrifugal, demokratik, egaliter dan sintetik, wajar jika di sepanjang era kesadaran nasional dan awal-awal kemerdekaan, sampai ke PRRI dan Dekrit Presiden 1959, yang dominan adalah justeru ideologi dan filosofi budaya politik yang dianut oleh kelompok masyarakat berbudaya M itu. Perjuangan menuntut kemer-dekaan dalam situasi dunia moderen dan sekaligus adalah ujung dari era kolonialisme Barat terhadap daerah-daerah jajahannya di Asia dan Afrikia, mengharuskan orang berjuang pada platform politik yang berlandaskan demokrasi, hak-hak asasi, kesamaan kedudukan di muka hukum, keadilan sosial bagi semua, dst. Semua ini sangat sejalan dengan hakekat budaya M. Makanya mereka seperti mendapat angin, sehingga merekalah yang banyak tampil ke depan menyuarakan tuntutan-tuntutan yang sejalan dengan hati nurani mereka itu. Mereka, ibarat bunga kembang setaman, berperan aktif di pentas nasional dalam berbagai kapasitas dan dalam berbagai forum dan situasi. Makanya kita lihatlah nama-nama besar yang berasal dari bumi

Minangkabau ini yang jumlahnya berjejer panjang dan sangat melebihi dari porsi dan persentase dari jumlah statistik etnik mereka sendiri. Era dari 1928 sampai 1959 yang berjalan selama masa krusial, menegangkan dan heroik selama masa 3 dekade itu adalah masa keemasan dari kelompok etnik M ini, untuk kemudian diikuti oleh masa kemunduran dan berkurangnya peran yang dimainkan oleh kelompok etnik yang sama selama 4 dekade berikutnya.

Dengan dikalahkannya PRRI dan dideklarasikannya Dekrit Presiden tgl 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 oleh Presiden Sukarno – di mana Sukarno menganggap bahwa musyawarah konstituante di Bandung telah gagal --, maka pendulum kekuasaan dan ideologi politik nasional berbalik arah ke yang berorientasi budaya J. Selama masa yang cukup panjang di bawah rezim Orde Lama Sukarno (1959-1965) dan dilanjutkan oleh Orde Baru Suharto (1965-1997) itu peran dari tokoh-tokoh politik Minang di pelataran nasional menjadi menciut dan pudar. Tokoh-tokoh yang kuat berpegang pada prinsip hidup dan filosofi budaya M nyaris tidak terpakai, dan bahkan dikucilkan, sementara mereka yang berkolaborasi berupaya mengambil manfaat bagi kepentingan daerah sehingga tidak ayal jatah-jatah pembangunan yang disediakan untuk Sumbar melebihi dari proporsi sesungguhnya jika dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Sambil berkapitulasi mereka berpegang pada ajaran: daripada tertelungkup lebih baik terereng. Sikap ini mengingatkan orang pada pilihan yang biasa diambil oleh kelompok minoritas berhadapan dengan kelompok mayoritas yang lebih dominan untuk kepentingan *survival* dan pertahanan diri. Secara statistik kependudukan orang Minang tidak lebih dari 5 % dari seluruh penduduk Indonesia, sementara Jawa lebih dari 50 %nya.

Masa selama 4 dekade di bawah rezim Orde Lama dan Orde Baru itu adalah juga masa yang sangat menentukan bagi perkembangan berikutnya sampai kita diantarkan ke era Reformasi sekarang ini. Peralihan dari era demokrasi-liberal (1945-1959) -- di mana tokoh-tokoh Minang banyak berperan dalam pembentukan opini bangsa serta arah dan kebijakan kenegaraan secara nasional --, ke era demokrasi-terpimpin dan demokrasi-pancasila di bawah kedua rezim Orla dan Orba itu, di mana peran tokoh-tokoh politik Minang menjadi mengecil dan bahkan menghilang, adalah sangat menentukan bagi perkembangan yang sebaliknya.

Selama masa yang panjang dalam berkapitulasi terhadap dominasi budaya J itu perubahan-perubahan besar terjadi di tengah-tengah masyarakat Minang sendiri. Budaya J yang menuntut keseragaman secara struktural dan hirarkik-vertikal dalam hampir semua bidang kehidupan di seluruh negara, menyebabkan hilangnya nagari

dan berubah menjadi desa dan pemerintahan desa ala di Jawa, serta beralihnya fungsi kepemimpinan tradisional "tungku nan tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin" ke tangan-tangan birokrasi dan instansi-instansi pemerintahan formal. Dengan hilangnya nagari dan tak lagi berfungsinya unsur-unsur kepemimpinan tradisional di tingkat akar rumput itu maka rakyat di Sumatera Barat terkooptasi ke dalam sistem pengaturan pemerintahan yang bersifat hirarkik-vertikal, yang berjenjang sampai ke atas, dan dengan sistem komando ala militer. Selama masa Orde Baru apa-apa memang diatur secara militer sehingga simpul-simpul pemerintahan yang ada pada setiap tingkatan itu adalah penguasa tunggal di daerahnya masing-masing. Menjadilah lembaga-lembaga musyawarah desa dan apapun namanya hanyalah sekadar alat pelegitimasi bagi kebijakan dari kades -- kepala desa-- yang sesungguhnya itupun hanyalah perpanjangan tangan dari simpul-simpul komando di tingkat di atasnya, di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dst, sampai ke pusat. Nun di pucuk di atas sana bercokollah sang bapak bangsa seorang diri yang di tangannya berhimpun semua simpul kekuasaan dan di sekelilingnya berkerumun para kroni politik yang memanfaatkan kesempatan berKKN untuk keuntungan diri dan kelompok kepentingan mereka.

Di tingkat akar rumput sendiri rakyat telah dijadikan sebagai massa mengambang *(floating mass)* yang tidak punya pegangan politik sendiri kecuali yang digariskan oleh pemerintah secara hirarkis-vertikal dari atas. Tidak ada kritik dan pendapat lain yang boleh disampaikan karena kritik dan pendapat lain itu dianggap sebagai suara-suara sumbang yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Prinsip-prinsip totaliterianisme-etatik dengan semangat militer berjalan tanpa hambatan. Dan pengkultusan kepemimpinan dengan semangat paternalistik-feodalistik telah menempatkan Sukarno dan Suharto sebagai bapak negara dengan kekuasaan absolut tanpa batas. Negara itu ada di tangannya dengan semboyan napoleonik yang sama: Negara itu adalah Saya *(l'etat c'est moi)*, yang intinya adalah sistem pemerintahan absolut-totaliter-etatik seperti yang berlaku dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa di masa silam. Siapapun bisa membayangkan apa yang terjadi di bumi Minangkabau selama masa Orla dan Orba itu yang filosofi dan pandangan hidupnya pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip totaliter-etatik itu. Program pembasuhan otak yang juga berlaku di seluruh Indonesia khususnya diarahkan kepada generasi muda yang masih di bangku sekolah. Mereka dijauhkan dari nilai-nilai adat, agama dan budaya yang tidak sejalan dengan cara pandang sinkretik yang menempatkan Pancasila sebagai agama negara. Kepatuhan

dan penghormatan kepada negara diindoktrinasikan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan formal maupun non-formal – melalui kegiatan pramuka, organisasi siswa, KNPI, dsb, dan melalui kegiatan penataran P4 yang wajib diikuti secara bergelombang. Akibatnya, generasi muda Minang di Sumatera Barat sendiri nyaris tidak lagi mengenal adat dan budaya dan bahkan nilai-nilai agama mereka sendiri. Mereka telah terkooptasi oleh budaya J yang datang dari pusat dan mereka sebaliknya menjadi orang asing dengan adat dan budaya leluhur mereka sendiri. Mereka lebih fasih menyebutkan dan menghafal di luar kepala butir-butir Pancasila dengan penjabarannya ke dalam sekian puluh butir-butir P4 lain-lainnya yang disuapkan kepada mereka melalui cara-cara indoktriner. Mereka digalakkan untuk senang baris-berbaris, menghormati bendera dengan menciumnya sambil di mana perlu menangis terisak-isak, berpakaian seragam ala militer dan berfikir monolitik secara militer.

Ketika nalin Reformasi dibunyikan di pengakhir era Orde Baru, 1997-1998, ternyata masyarakat Minang adalah yang paling tidak siap. Generasi muda di Jawa sendiri sampai mengejek generasi muda yang di Sumbar dengan mengirimkan paket celana dalam dan kutang wanita kepada rekan mereka yang di Sumbar. Selama era transisi itu tidak ada tokoh Minang yang bangkit dan nyaris tidak satupun yang berperan di pentas politik nasional. Ini misalnya ditandai dengan tidak seorang Minangpun yang duduk dalam kabinet Gus Dur, sementara dahulu sejak semula tidak pernah ada kabinet tanpa ada orang Minang di dalamnya.

Ketika pendulum kekuasaan telah berbalik arah, masyarakat Minang dengan tokoh-tokoh Minangnya ternyata tidak siap dan tidak muncul dalam menyambut dan menggantikan peralihan era kekuasaan. Malah sifat-sifat sentrifugal, demokratik-egaliter, dsb, yang merupakan warisan kekayaan budaya Minang itu tidak lagi dimiliki oleh generasi baru Minang yang sekarang. Mereka nyaris telah terserabut dari akar budayanya sendiri. Generasi tua yang mewarisi budaya sentrifugal, demokratik, egaliter, dsb, sementara itu telah berlalu dan tidak pula tanggap dalam mewariskannya ke generasi berikutnya.

Proses pencucian otak selama masa Orde Baru ternyata memang telah membuahkan hasil dengan dikebirinya generasi muda Minang itu terjauh dari nilai-nilai primordial yang dimiliki oleh generasi tua sebelumnya. Banyak dari generasi muda Minang sekarang yang bahkan kritis dan tidak sedikit yang alergi terhadap yang

berbau Minang dan kebudayaan Minang. Mereka yang tergolong ke dalam kelompok muda yang relatif kental Islamnya, cenderung mengkategorikan adat dan budaya Minang sebagai masih berbau jahiliyah yang harus diformat kembali. Mereka tidak menyukai adanya sistem matrilineal Minang berbaur dengan sistem patriarkal Islam, sistem warisan pusaka tinggi Minang berbaur dengan sistem warisan faraidh yang digariskan dalam Al Qur'an dan Al Hadith. Mereka tidak lagi bisa mengapresiasi kekayaan kebudayaan yang dihibahkan oleh generasi tua mereka itu. Sementara mereka yang tergolong ke dalam kelompok anak muda yang terbawa arus oleh budaya sensual-hedonistik-materialistik yang mengglobal dari luar melalui berbagai rayuan media massa elektronik nyaris mengenyam-pingkan semua nilai-nilai luhur yang tadinya dipegang teguh oleh generasi tua sebelumnya.

Yang kita lihat lalu adalah meluntumya budaya luhur di tengah-tengah masyarakat sendiri. Berbagai penyakit masyarakat yang selama ini tak pernah dikenal di tengah-tengah masyarakat Minang sekarang masuk dan menjadi barang biasa dan ada di mana-mana. Yang hilang adalah rasa malu, malu berbuat salah dan malu menyalahi norma-norma adat dan agama yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi. Sekarang penyakit-penyakit masyarakat apa yang tidak ada: pelacuran, narkoba, minum-minum, mabuk-mabukan, berjudi, pornografi, dsb, yang tidak hanya ditemukan di kota-kota, tetapi juga merembet sampai ke desa-desa. Kafe, disko, warung kelambu, panti pijat, penjaja seks wanita dan pria di tempat remang-remang, di hotel-hotel dan penginapan, dan pergaulan bebas muda-mudi, dsb, sepertinya adalah bahagian dari kehidupan yang ada di Sumbar sendiri terutama di kota-kota sekarang ini. Di tingkat elit politik sendiri, di eksekutif maupun di legislatif dan yudikatif, yang namanya KKN sudah membudaya dan menjadi permainan biasa yang orang tidak merasa risi dan malu lagi melakukannya. Malah KKN itu sekarang dilakukan secara "berjamaah" beramai-ramai. Di kantor-kantor pemerintahan sendiri bermacam-macam proyek dan praktek siluman diciptakan dengan dalih untuk menambah kesejahteraan para pegawai. Di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, tak ada yang lalu tanpa duit. Prinsip UUD atau *Money politics* telah begitu membudaya sehingga nyaris tak ada yang jalan tanpa itu.

Pemimpin tradisional yang dikenal dengan sebutan TTS (Tali nan Tigo Sapilin, Tungku nan Tigo Sajarangan), yakni ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, tinggal hanya di sebutan. Mereka tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Ninik mamak banyak yang memanfaatkan program peregistrasian tanah (prona) dari pemerintah yang melalui itu lalu menjual harta kaum

untuk kepentingan sendiri atau bersekongkol dengan pihak anak kemenakan yang setuju; yang akibatnya pertengkaran dalam kaum karena harta pusaka tinggi tak terelakkan. Ruang pengadilan di Sumatera Barat lalu dipenuhi oleh sengketa kaum berkaitan dengan tanah adat ini. Sementara itu alim ulama banyak yang meninggalkan jemaahnya dan berpindah ke kota-kota. Cerdik-pandai, apa lagi. Kehidupan di nagari yang masih berbasiskan pertanian tradisional tidak lagi ada tempat bagi yang bersekolah untuk tetap tinggal di kampung. Mereka ramai-ramai pergi merantau ke kota dan ke kota-kota besar di luar Sumatera Barat.

Gambaran-gambaran suram seperti ini yang kita lihat dari wajah sosial Sumatera Barat sejak tigapuluhan tahun kemari ini, sehingga Reformasi di Sumatera Barat nyaris tidak ada gaungnya sama sekali. Hal ini semua juga berbarengan dengan dekadensi moral dan krisis multidimensi yang melanda masyarakat seluruhnya.

Karenanya, dengan kita kembali ke jati diri, kembali ke filosofi hidup ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah), dan kembali ke Nagari dan ke Surau sekarang ini, orang mempertanyakan, apakah ini sebuah igauan semata atau benar-benar datang dari kesadaran untuk melakukan taubat dan penyesalan bersama bahwa jalan yang ditempuh selama ini telah salah, dan salah arah, dan karenanya ingin kembali ke jalan yang benar sejalan dengan prinsip hidup ABS-SBK itu. Apakah juga dengan diadukannya para anggota DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten oleh generasi muda mahasiswa dan LSM ke kejaksaan dan pengadilan karena telah melakukan KKN dengan menilap uang negara secara bersama-sama, dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri sendiri, dsb, adalah juga kulminasi dari krisis multidimensi itu, yang di balik itu diharapkan masyarakat Sumatera Barat akan bisa sadar dan mulai menata ulang kembali tatanan sosial mereka sesuai dengan filosofi yang mereka gaungkan: ABS-SBK itu?

Jika itu niat yang terkandung di hati maka Sumatera Barat sesungguhnya telah melakukan upaya kepeloporan yang cukup berani yang pada gilirannya bisa diliru oleh kelompok masyarakat lain-lainnya di luar Sumatera Barat. Penyalah-gunaan wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada badan-badan legislatif maupun eksekutif dan yudikatif di luar Sumatera Barat bisa berkali lipat dari yang terjadi di Sumatera Barat sendiri, yang menyebabkan, secara keseluruhan, negara ini telah berada di tepi jurang kebangkerutannya, dan kehilangan kompas kemana harus diarahkan ke masa depan.

Masalahnya sekarang adalah, apakah titik-balik yang berlaku di Sumbar sekarang ini adalah sebuah pertanda dari langkah-langkah rektifikasi selanjutnya

dalam kehidupan bernegara yang dimulai dari Sumber ataukah hal itu hanyalah sekadar simptom kegerahan ataupun kegairahan politik yang kemudian lalu kembali lagi ke jalur penyimpangan seperti yang telah terjadi sejak 40an tahun ke mari ini di bawah Orla dan Orba sampai ke rezim yang ada sekarang ini. Yang jelas, dalam mendayung bahtera negara ke depan, kita memerlukan rektifikasi, pembetulan, dari arah jentera negara ke masa depan.

Secara bernegara kita sesungguhnya telah memiliki yang namanya arah dan landasan berpijak itu, yaitu seperti yang kita tuangkan dalam UUD 1945 dan yang telah diperbaharui itu. Namun yang kita praktekkan selama ini jauh menyimpang dari itu. Dan kita tidak lagi berada di atas relnya itu, yang akibatnya hukum tidak jalan seperti seharusnya, dan penyimpangan berbagai rupa terjadi di berbagai lini kehidupan itu. Dalam perbandingannya, baik di Asia Tenggara, di Asia dan Afrika, maupun di dunia seanteronya, kita telah menjadi bangsa yang jauh ketinggalan di hampir semua bidang kehidupan itu. Masalahnya, sekali lagi, karena tidak salunya kata dengan perbuatan.

Hal yang sama juga terjadi dengan kita dalam beragama (Islam) dan dalam memakaikan norma-norma adat (Minang) serta norma-norma peradaban lainnya. Kita sangat sadar bahwa yang kita miliki itu adalah nilai-nilai ideal yang sangat luhur dan sangat bisa diandalkan; bahkan kita mengatakan: melebihi dari yang lain-lainnya *(yu'la wala ya'lû 'alaih)*. Namun kita tidak mempedomani dan tidak mempraktekkannya. Yang kita praktekkan adalah yang jauh menyimpang dari itu. Yang mempraktekkan nilai-nilai luhur dan ideal itu adalah justeru orang-orang dan bangsa-bangsa lain yang tidak memeluk agama dan peradaban Islam itu.

Masalahnya, oleh karena itu, adalah masalah kesadaran, masalah azam dan ketetapan hati dalam mempraktekkan nilai-nilai ideal itu, baik secara orang per orang, secara berkelompok, bersuku-bangsa dan bernegara. Dalam hal ini yang diperlukan tentu saja adalah pemimpin yang benar dan kuat, yang memberikan contoh dan suri tauladan yang dimulai dari diri sendiri. Dengan pemimpin yang benar dan kuat serta dimulai dari diri sendiri itu, diharapkan hukum akan jalan, dan norma-norma ideal yang bersumber dari agama, adat dan peradaban lainnya itu akan bisa kembali menjadi suluh-bendang dalam menerangi jalan ke depan. Dengan pemimpin yang benar dan kuat dan yang berdiri di atas jalur kebenaran itu diharapkan akan ditemukan sistem dan struktur yang tepat, yang diperlukan untuk membangun kembali bangunan kenegaraan dan kemasyarakatan yang telah goyah dan nyaris porak poranda ini.

Orang mungkin sekali lagi akan menoleh ke Sumatera Barat ini, menunggu munculnya orang-orang berbobot dengan kapasitas kepemimpinan yang tinggi dan tahan uji seperti yang dahulu lahir dari bumi Minangkabau ini. Mungkin melalui sistem pendidikan yang tepat yang juga menekankan pada pembentukan watak dan jati diri di samping ilmu pengetahuan dan wawasan peradaban yang luas, Sumatera Barat dengan budaya Minangkabaunya akan bisa tampil sekali lagi dalam memberikan sumbangan dan kontribusinya bagi kejayaan bangsa.

Sejauh ini, bagaimanapun, persyaratan-persyaratan yang diperlukan itu belum lagi terpenuhi; tetapi kesadaran ke arah itu mungkin telah mulai tumbuh dan dirasakan. Untuk menjadi bangsa pelopor, bagaimanapun, diperlukan persyaratan yang ketat dengan disiplin hidup yang kuat dan tahan uji. Sementara ini, Sumatera Barat masih harus akan diuji dan dimana perlu didera dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman pahit akibat dari salah urus, salah tingkah, dsb itu, yang masih akan dilalui, sampai kesadaran itu benar-benar muncul dan dipraktekkan dalam pengalaman sehari-hari. Di balik itulah sifat-sifat kepeloporan itu baru akan muncul kelika nilai-nilai ideal itu telah mulai dipraktekkan dalam kehidupan nyata yang sesungguhnya. ***